

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan zaman dan perkembangan teknologi informasi (TI) terus mengalami peningkatan penggunaan yang sangat cepat dan membawa pengaruh perubahan dalam segala kegiatan baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Teknologi Informasi dapat dikatakan bentuk penawaran new sistem pengelolaan pada organisasi atau instansi maupun perusahaan yang kegiatan kerjanya terkomputerisasi. Teknologi informasi adalah suatu yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan teknologi informasi merupakan hal yang strategis untuk pengambilan keputusan (Tata Sutabri 2014:3). Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini sangat memberikan manfaat disegala bidang, sehingga di dalam penerapan teknologi dan informasi memberikan fungsi sebagai peningkatan kinerja dan kegiatan agar lebih efektif, efisien dan akurat agar meningkatkan produktivitas.

Bentuk pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan komunikasi pada ranah pemerintahan yaitu *e-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik. Pengertian *e-Government* menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *e-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Implementasi dari *e-Government* di Indonesia didukung oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 sebagai panduan kebijakan serta strategi nasional terhadap strategi pengembangan dari penerapan *e-Government*. Pelayanan publik yang menggunakan sistem e-

Government merupakan bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam bidang pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pelayanan atau proses bisnis yang transparan, akuntabilitas dan bebas dari korupsi. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan penerapan e-Government yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kegiatan pemerintahan agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sehingga pemerintah mau tidak mau diharuskan bisa terus berinovasi, inovasi sejatinya tidak selalu melakukan penemuan terhadap hal-hal yang terbaru, namun bisa berupa sebuah pendekatan terbaru yang memiliki sifat secara konteks pada artian menginovasi bukan sebatas melalui sesuatu yang belum tersedia lalu ditemukan pengagasan kemudian mempraktikkan inovasi, namun bisa berbentuk inovasi yang dihasilkan dari peningkatan dan penambahan fungsi mutu untuk menginovasi ketersediaan yang sudah ada (Jalma & Putera, 2019). Dalam perkembangannya, sebagian besar tahap pengembangan aplikasi e-government yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja. Sering muncul asumsi jika suatu pemerintah daerah telah memiliki website maka beranggapan telah menerapkan aplikasi e-government. Padahal konsep e-Government, tidak saja menampilkan informasi pemerintah melalui layanan website saja, melainkan terjadinya transformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang semula menggunakan media konvensional beralih menggunakan teknologi informasi.

Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;

2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Adanya *e-Government* memungkinkan untuk terjalannya komunikasi serta interaksi terhadap antar pemerintah satu sama lain seperti pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat. Penerapan *e-Government* berfungsi agar pemerintah dapat menyebarkan informasi serta dapat berinteraksi dengan masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya (Supriyanto, 2016). Menurut Nugroho (2007) tahapan perkembangan implementasi e-government, dibagi menjadi empat :

1. *Web Presence*, yaitu memunculkan website daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah.
2. *Interaction*, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi Email dalam website pemerintah.
3. *Transaction*, yaitu web daerah yang selain memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi dengan fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah.
4. *Transformation*, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi.

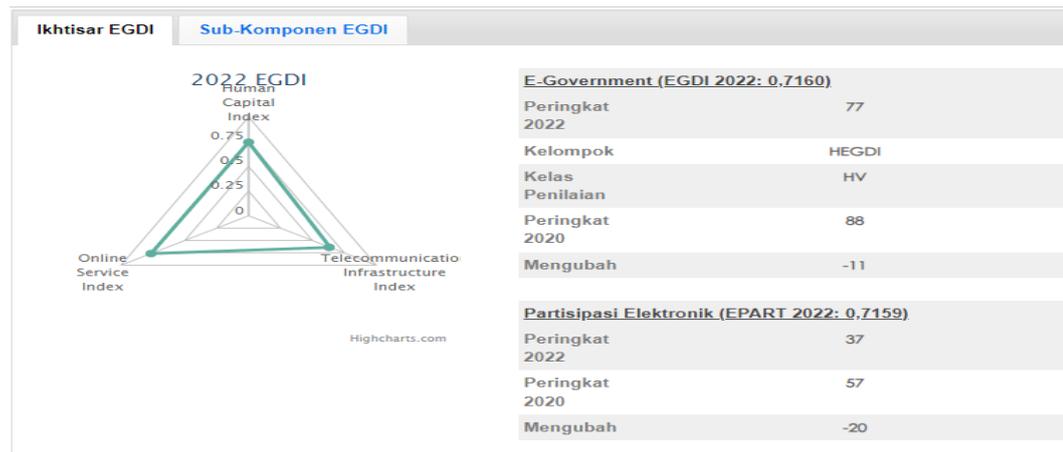
Dalam hal ini revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan

jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

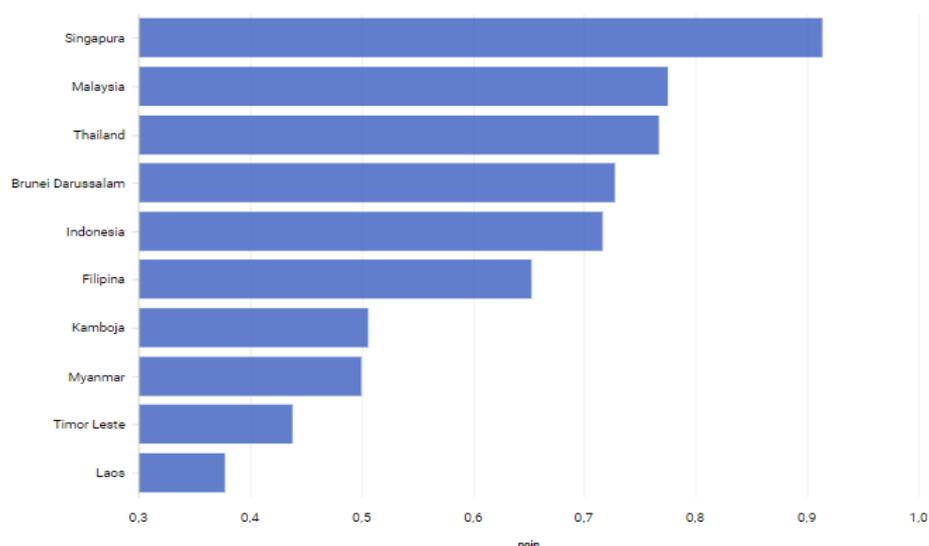
Implementasi *e-Government* pada pemerintahan di Indonesia diperjelas dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan sebuah kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk terciptanya *good governance*, reformasi birokrasi dan transformasi digital, maka pembangunan nasional arsitektur SPBE yang sedang berjalan diperlukan evaluasi berkala untuk mengetahui tingkatan kemampuan dan kematangan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada masing-masing kementerian, pemerintah daerah dan lembaga yang sudah dijalankan, serta bentuk pembenahan sistem pemerintah dalam melaksanakannya.

Menurut peninjauan evaluasi yang dilakukan pada tahun terhitung 2022 terdapat kurang lebih sebanyak 455 institusi yang sudah mengimplementasikan SPBE dan melaksanakan evaluasi SPBE, terdiri dari Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Lembaga, Lembaga Non Struktural dan Pemerintah Kota/Kabupaten (Keputusan Menteri PAN-RB No. 108 tahun 2023).

Selain itu, United Nations (UN) E-Government Survey 2022 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 77 dari 193 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018 (Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2022).



Gambar 1.1 *E-Government Development Indeks* dan *E-Participation Indeks*
(Sumber : UN *E-Government Knowledgebase*)



Gambar 1.2 *E-Government Development Indeks Sub Region* (Asia Tenggara)
(Sumber : Website Katadata.co.id)

Dari dua gambar data diatas dapat dilihat bahwa Indonesia menempati posisi 77 pada tahun 2022 yang naik 11 peringkat dengan perolehan nilai 0,7160 dibanding pada tahun 2020 yang menempati peringkat 88 dengan perolehan nilai 0,6612, selain itu untuk *E-Participation*/Partisipasi Elektronik Indonesia pada tahun 2022 menempati posisi 37 yang naik 20 peringkat dengan perolehan nilai 0,7159 dibanding pada tahun 2020 yang menempati peringkat 57 dengan perolehan nilai 0,7500. Dengan perolehan nilai *E-Government Development Indeks* sebesar 0,7160 menempatkan Indonesia pada posisi ke 5 di Asia Tenggara (*Sub Region*) diatas Kamboja dan Filipina.

Dengan diberlakukannya evaluasi untuk memastikan bahwa seberapa baik sistem dan komponen-komponen yang dijalankan dalam organisasi pemerintahan untuk pengelolaan serta peningkatan performa dan menjalankan kinerja selanjutnya.

Selain itu, evaluasi merupakan sebuah bentuk proses penilaian yang sangat dibutuhkan terhadap arsitektur pembangunan SPBE yang telah dilaksanakan oleh sejumlah lembaga, badan dan instansi pemerintahan, terutama salah satunya pemerintah Kota Bekasi guna menghasilkan nilai indeks yang merupakan bentuk representasi dari tingkat kematangan (*maturity level*). Pada penerapan SPBE di Indonesia terutamanya di Kota Bekasi, penilaian kinerja dan performa sistem pemerintahan dilakukan untuk adanya pembenahan dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan terkait pemantauan dan evaluasi SPBE. Pedoman tersebut menggunakan konsep penilaian *Capability Maturity Model Integration* (CMMI) untuk tingkat kematangan dari kapabilitas proses, sedangkan untuk pengukuran tingkat kematangan kapabilitas layanan menggunakan *e-Government Maturity Model* (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).

Tabel 1.1 Tabel Nilai Indeks Pemantauan dan Evaluasi SPBE Jawa Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Kab. Sumedang	3,84	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kota Bandung	3,61	Sangat Baik
3.	Pemerintah Kota Depok	3,42	Baik
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,37	Baik
5.	Pemerintah Kab. Bogor	3,33	Baik
6.	Pemerintah Kota Cirebon	3,17	Baik
7.	Pemerintah Kab. Indramayu	3,09	Baik
8.	Pemerintah Kota Cimahi	3,09	Baik
9.	Pemerintah Kab. Karawang	3,08	Baik
10.	Pemerintah Kab. Kuningan	2,88	Baik
11.	Pemerintah Kab. Bandung	2,82	Baik
12.	Pemerintah Kab. Pangandaran	2,82	Baik
13.	Pemerintah Kota Bekasi	2,78	Baik

14.	Pemerintah Kota Bogor	2,75	Baik
15.	Pemerintah Kab. Cirebon	2,66	Baik
16.	Pemerintah Kab. Bandung Barat	2,65	Baik
17.	Pemerintah Kab. Ciamis	2,64	Baik
18.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	2,62	Baik
19.	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	2,58	Cukup
20.	Pemerintah Kota Banjar	2,38	Cukup
21.	Pemerintah Kab. Cianjur	2,37	Cukup
22.	Pemerintah Kab. Subang	2,35	Cukup
23.	Pemerintah Kab. Sukabumi	2,29	Cukup
24.	Pemerintah Kab Purwakarta	2,28	Cukup
25.	Pemerintah Kab. Bekasi	1,71	Kurang

(Sumber : Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.108 Tahun 2023)

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan peringkat 13 dari 25 wilayah pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Barat, yang dimana pemerintah Kota Bekasi mendapatkan nilai indeks Tauval 2,78 yang dapat dikategorikan sebagai nilai yang baik.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) sangat dibutuhkan agar pelayanan SPBE dapat memenuhi standar pencapaian dan kepatuhan supaya dapat mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mengefektifkan kinerja pemerintahan. Pedoman evaluasi SPBE dari PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020 juga digunakan karena mencakup indikator untuk evaluasi dan melihat proses bisnis baik berdasarkan struktur organisasi dan proses organisasi yang sudah dilakukan, serta informasi yang tersedia lebih lengkap untuk dilakukan analisis pengukuran tingkat kematangan yang kemudian menjadi rekomendasi bagi tahap selanjutnya.

Dari sedikit pemaparan pada latar belakang, pengusungan tema penelitian terkait EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA BEKASI. Tema ini diangkat untuk mengevaluasi SPBE yang

sudah diterapkan menggunakan teori William N Dunn untuk mengukur keberhasilan dari kebijakan SPBE serta melihat nilai indeks yang merujuk kepada hasil nilai indeks tingkat kematangan SPBE pada Pemerintahan Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan sejumlah rumusan masalah untuk penelitian evaluasi tingkat kematangan dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kota Bekasi :

1. Bagaimana evaluasi kebijakan SPBE di Kota Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi?
3. Strategi apakah yang dilakukan diskoninfo dalam mengatasi hambatan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui evaluasi SPBE sejauh mana pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan Kota Bekasi.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi.
3. Mengetahui Strategi yang digunakan DISKOMINFOSTANDI dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi untuk terlaksananya SPBE di Kota Bekasi.

1.4 Signifinkasi Penelitian

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti akan membagi signifikasi menjadi dua hal, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah banyak dilakukan sebelumnya. Berikut ini jumlah kajian literatur

penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini sebanyak 10 (Sepuluh) referensi jurnal :

Tabel 1.2 Signifikansi Akademis

NO	Nama Peneliti	Judul Refrensi	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu
1.	Ikrima Amand a W., Admaj a Dwi H., Widhy Hayuh ardhika Nugrah a P. (2019).	EVALUASI KAPABILITAS PROSES PENGEMBANGAN APLIKASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG DENGAN PEDOMAN CMMI – DEV 1.3,	Metode ini menggunakan kualitatif study pustaka dan analisis dokumen lapangan untuk menilai <i>Capability Maturity Modeln Integration</i> (CMII)	Penelitian ini menitikberatkan pada Proses evaluasi menggunakan metode <i>Capability Maturity Modeln Integration</i> (CMII) dengan melihat pengembangan aplikasi atau layanan SPM (Surat Pernyataan Miskin), Sambat (Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu), dan SURADI (Surat Digital) yang berfokus menilai area <i>Requirements Development</i> (RD), <i>Requirements Management</i> (REQM), <i>Technical Solution</i> (TS), <i>Configuration Management</i> (CM), <i>Verification</i> (VER), dan	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governence</i>)

				<i>Process and Product Quality Assurance (PPQA)</i>	
2.	Agus Widiyarta, Choiriyah Eka Windiastuti, Hilmi Izaz Robbani (2020).	EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	Menggunakan metode kualitatif study pustaka, dan wawancara para responden pengguna untuk melihat kematangan penerapan aplikasi SIOLA	Penelitian ini menitikberatkan Evaluasi Kebijakan dalam implementasi aplikasi SIOLA menggunakan model evaluasi William N. Dunn yang terdapat didalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik dengan menggunakan 6 Indikator penilaian (Keefektivitasan, Keefisienan, Kecukupan, Perataan, Responsif, dan Ketepatan/Akurat). Hasil penilaian dengan menggunakan metode William N. Dunn menyatakan bahwa aplikasi SIOLA belum mencapai kategori optimal.	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode yang digunakan kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
3	Hemy Dwi Pratiwi, Widhy Hayuhardhika N.P.,	GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BESAR	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis dokumen	Penelitian ini menitikberatkan pada Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya

	Admaja Dwi Herlang (2020)	MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	penilaian SPBE	merujuk pada PermenpanRB No. 5 Tahun 2018 tepatnya pada domain 3 layanan SPBE, aspek 6 layanan administrasi berbasis elektronik, dan 7 indikatornya menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sumbawa.	menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
4	I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda P, Anak Agung Ketut A. C., Kadek Suar W, Ati (2020).	<i>EVALUATION OF E-GOVERNMENT MATURITY MODELS IN SUB-DISTRICT PUBLIC SERVICE IN INDONESIA USING THE SPBE FRAMEWORK</i>	Jenis penelitian: Metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada permasalahan SPBE hanya sampai pada tingkat kabupaten/kota sehingga tata kelola pemerintahan pada tingkat kecamatan terutama pelayanan publik PATEN. Didalam penelitian ini proses evaluasi hanya berfokus pada Domain 2 (Tata Kelola) dan Domain 3 (Layanan SPBE) yang masih relevan dengan PATEN, menggunakan	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)

				pedoman evaluasi PERMENPAN No.59 Tahun 2020.	
5.	M. Rizeki Yuda Saputra, Wing Wahyu Winarno, Hendri (2020).	EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SPBE DI DISPERINDAG KABUPATEN BANJAR MEGGUKAN CMMI DEV. VERSI 1.3,	Jenis penelitian: Metode kualitatif deskriptif, dan analisa data evaluasi SPBE domain layanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar untuk menilai domain 3 tentang layanan SPBE yang bertujuan agar Sistem naskah dinas yang lebih efisien, Sistem manajemen kepegawaian yang lebih baik dan <i>responsive</i> , Sistem manajemen perencanaan dan penganggaran kegiatan yang lebih luas, menciptakan sistem manajemen kinerja yang efektif dan efisien, serta sistem layanan pengaduan bisnis/publik	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
6.	Mellia Seyselis, Galih Wahyu Pradana	Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan	Jenis penelitian: Metode kualitatif deskriptif penelitian studi kepustakaan (library)	Menitikberatkan pada pembahasan penggunaan aplikasi e-Monev pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya guna melihat sudah berjalan	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi

		Pembangunan Kota Surabaya	research)	dengan efektif dibuktikan dengan hasil data penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tingkat capaian keberhasilan program pembangunan, persentase produk hukum yang di selesaikan, juga rata-rata penyerapan anggaran yang meningkat. Saran dari penelitian ini adalah memperbaiki interface aplikasi, melakukan pelatihan penggunaan sistem yang lebih masif	Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
7	Muhammad Dwi Maulidin (skripsi)	Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Aplikasi E-Monev Pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Periode 2017 (Studi	Jenis penelitian: Metode kualitatif deskriptif, pengamatan, wawancara dan dokumentasi.	Menitikberatkan pada pembahasan penggunaan aplikasi e-Monev pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten bojonegoro, Renja OPD yang dilakukan setiap triwulan sekali masih belum efektif. Hal ini dikarenakan pada ukuran efektivitas	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya

		kasus pada badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bojonegoro)		yang telah ditentukan seperti adanya tujuan yang jelas, sumber daya manusia, struktur organisasi, adanya dukungan sarana dan prasarana, serta sistem nilai yang dianut, masih belum terpenuhi dengan baik.	capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
8.	Heriyanto	Urgensi Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik	Metode Kualitatif	penerapan dan pemanfaatan e-government dalam pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat , Penerapan E Government di Indonesia sudah berjalan baik namun perlu peningkatan pada aspek Infrastruktur telekomunikasi , tata kelola, layanan, dan sumber daya manusia	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
9.	Alifiani S Qotrunisa, Soni F	Model Arsitektur Layanan Administrasi	Jenis penelitian: Metode kualitatif deskriptif	Kuningan berada pada kategori cukup dan belum memiliki standardisasi	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu

	S Gumilang, Ryan A Nugraha	Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pemerintah Daerah Kuningan	dan explorasi analisa: evaluasi SPBE (Permenpan 59 Tahun 2018)	layanan SPBE. Hal ini yang menjadikan belum optimalnya penerapan SPBE dari segi layanan SPBE. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi terhadap layanan SPBE yang berorientasi terhadap proses bisnis dan aplikasi yang sudah ada maupun yang belum ada yang menjadi target dalam penelitian ini. Sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan pemerintahan dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengelolaan data dan informasi publik pada Pemkab	metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn, dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
10	Arifin La Adu, Rudy Hartanto, Silmi Fauziani	Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Pada Pemerintah Daerah	Jenis penelitian: Metode kualitatif deskriptif dan explorasi, analisa deskriptif evaluasi SPBE (Permenpan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam menerapkan layanan SPBE dapat dikategorikan ke	Perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu dalam hal ini yaitu metode kualitatif deskriptif dan evaluasinya menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William N Dunn,

			n 59 Tahun 2018)	dalam 4 hambatan / aspek, yaitu kebijakan/regulasi , perencanaan dan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur TI. Hambatan-hambatan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam implemetasi layanan SPBE sehingga kualitas pelayanan publik pada masyarakat menjadi lebih baik.	dan fokus dalam pembahasannya untuk terwujudnya capaian kebijakan tersebut yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
--	--	--	------------------	---	--

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian pada skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana usaha dan kerja Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian dalam mengembangkan dan mengusahakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dikuasai secara penuh baik pemahaman dan penggunaan oleh semua OPD/SKPD untuk menunjang kerja pemerintahan, serta dengan adanya SPBE pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal dan memuaskan. Dalam penelitian ini peneliti juga mengharapkan beberapa hal dari penulisan skripsi ini :

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah referensi terutama yang berkaitan dengan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- b. Memberikan masukan untuk dasar pertimbangan dalam rangka mengevaluasi kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bekasi.
- c. Memberikan sumbangan bagi kalangan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam bentuk tulisan. Baik yang nantinya menjadi bahan bacaan/literature maupun kepentingan kajian-kajian ilmiah seputar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- d. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjabaran dari sistematika penulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan dan berisikan pembahasan penulis, agar diperoleh pembahasan yang memberikan yang memberikan penjelasan secara menyeluruh maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengilustrasikan gambaran umum mengenai alasan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang dirumuskan menjadi pertanyaan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari, signifikansi akademik, dan signifikansi praktis serta memuat sistematika penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan terdahulu.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai pembahasan teori yang menguraikan sejumlah teori yang berkaitan dengan judul besar pembahasan pada penelitian tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan sebagai upaya meningkatkan sistem manajemen pemerintahan dan tata kelola pemerintahan serta pada bab ini peneliti juga menguraikan kerangka berfikir dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, penentuan populasi dan sample, teknik pengolahan data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian Bab Pembahasan penelitian atau hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, pemaparan hasil peneliti dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, pembahasan yang bersi tentang hasil penelitian yang tidak mendukung dengan teori yang digunakan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut, dan pada bab ini juga terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari penelitian yang telah peneliti lakukan